

Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Pariwisata di Desa Ngargogondo, Magelang, Jawa Tengah

Stefani Ekky Puspa Dewi¹, Aldi Herindra Lasso²

Affiliation

^{1,2} Fakultas Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana.

Correspondence

Aldi Herindra Lasso. Fakultas Interdisiplin. Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711. Email: aldi.lasso@uksw.edu.

Abstract

Community participation is an important element in the development of community-based tourism. However, in practice, people participation is not easy to encourage because the community itself consists of various stakeholders. Presenting a case study of community participation in Ngargogondo Village, this study elaborates on the role of rural communities in tourism development. Through a qualitative approach with in-depth interview in data collection, this study analyzes the forms of participation of the Ngargogondo Village community in local tourism development. The findings show that three community groups in Ngargogondo Village carry out different levels of participation: citizen control, consultation, and manipulative. This shows that the community is heterogeneous, thus, community-based development in a village should be implemented with different approaches that adapt to the diversity of stakeholders in it.

Keywords: Development, tourism, community, participation, village

Article Information: Submitted 05 October 2021 | Revised 29 November 2021 | Accepted 16 December 2022



Copyright © 2021 by the author(s). This article is published by Universitas Gadjah Mada, Indonesia under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate, and create derivative works of this article (for both commercial and noncommercial purposes), subject to full attribution to the original publication and author(s). The full terms of this license may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Pendahuluan

Pariwisata banyak digadang sebagai alat efektif pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan menerima manfaat dari adanya kegiatan pariwisata baik secara ekonomi maupun sosial sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kepariwisataan (Meilania, 2019). Berdasarkan hal ini, masyarakat seharusnya menjadi nadi pembangunan pariwisata. Pendekatan pembangunan berkelanjutan sendiri melihat masyarakat di sebuah destinasi merupakan pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam pembangunan pariwisata (UNWTO, 2014). Hal ini yang mendasari pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat yang berfokus pada pelibatan masyarakat setempat atau tuan rumah untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Masyarakat setempat memiliki peran penting dalam kontribusi ekonomi dan menciptakan pengawasan lingkungan yang efektif dan berdasar pada pengetahuan lokal, perlindungan terhadap warisan dan budaya, dan pemberdayaan sosial (Sangkakorn & Suwannarat, 2013). Selain itu, peran aktif masyarakat yang dapat dilakukan secara tatap muka, juga dapat memberikan kontribusi berupa buah pikiran (Ira & Muhamad, 2020).

Pariwisata Berbasis Masyarakat sendiri banyak diadopsi di negara-negara berkembang di mana masalah kesejahteraan sering terjadi dalam komunitas masyarakat pedesaan. Pariwisata Berbasis Masyarakat diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan manfaat dari pembangunan pariwisata. Namun demikian, pada prakteknya, para pemangku kepentingan memusatkan perhatian mereka pada upaya-upaya mempertahankan industri pariwisata itu sendiri (Blackstock, 2005), yang tidak jarang mengabaikan masyarakat di destinasi. Hal ini diperburuk dengan pendekatan pembangunan secara *top-down* yang umum terjadi dalam negara-negara berkembang (Tosun, 2001). Padahal, mengabaikan masyarakat lokal dengan tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dapat menghambat proses pembangunan akibat tidak adanya dukungan masyarakat yang tidak jarang berakhir dengan konflik (Geogra & Gadjah, 2013; Ndlovu et al., 2011). Dengan demikian, pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat.

Kajian-kajian mengenai partisipasi masyarakat umumnya melihat masyarakat sebagai sebuah komunitas yang cenderung homogen dimana masyarakat di dalamnya menerima dampak pariwisata yang sama (Cater, 2006; Tolkach & King, 2015). Padahal, masyarakat dalam sebuah komunitas sosial terdiri dari pemangku kepentingan yang berbeda-beda sehingga dampak pariwisata yang diterima dan peran serta masyarakat juga berbeda-beda (Lasso & Dahles, 2021). Kepentingan ini pula yang memengaruhi sejauh mana peran yang dimainkan oleh individual atau kelompok masyarakat tertentu.

Menggarisbawahi keberagaman di dalam sebuah komunitas masyarakat, penelitian ini menganalisa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Desa Bahasa Borobudur yang terletak di Desa Ngargogondo, Magelang Jawa Tengah. Desa Bahasa Borobudur merupakan tempat wisata yang berhasil mengundang ribuan wisatawan, terutama dari kalangan pelajar di seluruh Indonesia (Ferri, 2019). Bentuk wisatanya bergerak di bidang wisata edukasi Bahasa Inggris. Konsep yang dibentuk adalah Belajar Bahasa Inggris sambil berwisata. Perkembangan program Desa Bahasa yang cukup pesat tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Ngargogondo dalam mendukung pembangunan pariwisata di daerahnya.

Kajian Literatur

Partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat karena pembangunan ini mengutamakan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan. Partisipasi merupakan keterlibatan orang-orang dalam masyarakat untuk menyelesaikan tantangan mereka sendiri. Brett (2010) menyatakan bahwa partisipasi merupakan kegiatan pemberdayaan manusia agar masyarakat mampu menggali kapasitas mereka, menjadi aktor sosial aktif, mengelola sumber daya, mengambil keputusan dan mengontrol kegiatan yang berdampak pada hidup mereka.

Partisipasi masyarakat adalah pembagian kembali kekuasaan di mana masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk dalam proses ekonomi atau politik, mengendalikan masalah yang mereka hadapi dengan kekuasaan yang mereka miliki. Partisipasi masyarakat mendasari keterlibatan masyarakat di mana mereka diberi kekuatan untuk memecahkan masalah mereka sendiri dalam mengambil keputusan. Di dalam pariwisata terdapat dua pandangan dalam mengamati partisipasi masyarakat lokal: dalam proses pengambilan keputusan dan dalam manfaat dari pengembangan pariwisata (Timothy, 1999). Lebih jauh Timothy menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat dengan memfasilitasi keinginan, tujuan masyarakat, dan kemampuan mereka dalam menyerap pariwisata.

Menurut Arnstein (1969), di dalam Pariwisata Berbasis Masyarakat, terdapat tingkatan partisipasi masyarakat yang dibagi menjadi 3 bagian besar yakni Nir-partisipasi, Derajat Tokenisme, dan Derajat Kekuatan Masyarakat (Okazaki, 2008). Di dalam ketiga kategori ini, terdapat lagi delapan anak tangga partisipasi masyarakat. Tangga yang pertama disebut sebagai Manipulasi. Partisipasi manipulasi ini menggambarkan bahwa pemangku kepentingan memanfaatkan partisipasi masyarakat sebagai suatu hubungan yang terdistorsi. Kedua, partisipasi Terapi menggambarkan bahwa nilai dan sikap masyarakat lokal mengikuti masyarakat yang lebih besar yang memiliki kekuasaan. Ketiga, partisipasi Informasi, yang menggambarkan bahwa penduduk setempat sudah diberi tahu mengenai hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka untuk berpartisipasi dengan masyarakat yang lebih luas dan sah. Masyarakat pada level ini mendapat informasi dari pejabat publik namun tidak diberi ruang untuk negosiasi. Proses memberikan informasi menggunakan media seperti pamflet dan poster, yang mencegah pertanyaan sehingga informasi yang didapat bersifat dangkal dan tidak relevant.

Keempat, partisipasi Konsultasi, yang menjelaskan bahwa masyarakat lokal sudah termotivasi untuk mengemukakan pendapat, satu langkah lagi menuju ke partisipasi penuh. Pada anak tangga ini terdapat aliran informasi dari dua arah, melalui pertemuan, jejak pendapat, dan survei. Namun pada tahap ini, masukan publik kurang diperhitungkan. Kelima, partisipasi Ketenangan, terdapat pertumbuhan pengaruh publik secara bertahap, namun sebagian besar masih dalam bentuk tokenisme. Keenam, partisipasi Kemitraan, masyarakat lokal dan pemegang kekuasaan melakukan negosiasi, sehingga tercipta redistribusi mengenai kekuasaan dan tanggung jawab, untuk mengambil keputusan dan membuat rencana. Ketujuh, partisipasi Kekuatan Delegasi, dimana masyarakat lokal memiliki kekuasaan yang dominan dalam pengambilan keputusan. Kedelapan, partisipasi Kontrol Masyarakat, masyarakat lokal memiliki kontrol penuh dan kekuasaan untuk membuat kebijakan, dan mengatur manajemen. Berikut ilustrasi Tangga Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein (1969):

Tabel 1. Level Partisipasi Masyarakat dan Redistribusi Kekuasaan

Derajat Kekuatan Masyarakat	8. Kontrol Masyarakat 7. Kekuatan Delegasi 6. Kemitraan
Derajat Tokenisme	5. Ketenangan 4. Konsultasi 3. Informasi
Nir-partisipasi	2. Terapi 1. Manipulasi

Sumber: Arnstein (1969)

Pembangunan tidak dapat mengabaikan keberadaan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk dapat merangkul masyarakat dalam proses pembangunan. Namun di dalam masyarakat sendiri terdapat struktur sosial dan pemangku kepentingan yang berbeda-beda, yang berdampak pada bentuk peran yang dimainkan oleh para pemangku kepentingan tersebut. Menemukanali perbedaan bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi hal yang penting untuk membantu penentuan pendekatan yang tepat guna menghasilkan partisipasi masyarakat yang optimal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlangsung dari Bulan Desember 2020 sampai Maret 2021. Serangkaian wawancara dengan anggota masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait dilakukan dengan cermat. Partisipan dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling yang merupakan metode pengambilan sampel non-probabilitas yang diterapkan ketika subjek sulit diakses dengan karakteristik tertentu. Adapun proses analisa dilakukan dengan menggunakan analisa tematik. Rekaman data yang diperoleh ditranskripsi untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu untuk ditarik ke dalam tema yang lebih besar. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi data dengan membandingkan dan mengkontraskan temuan di lapangan dengan literatur akademik.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Ngargogondo Magelang, Jawa Tengah

Desa Ngargogondo, Magelang, Jawa Tengah terletak 3 km dari Candi Borobudur dan memiliki banyak pemandangan alam yang mempesona seperti Perbukitan Menoreh dan persawahan. Jumlah penduduknya ada 1791 jiwa dengan mata pencaharian utama sebagai petani (cabe, jagung, kacang, singkon, jahe dan kunir) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2019). Di sekitar Desa Ngargogondo, terdapat 3 ikon pariwisata yang diunggulkan, yaitu Desa Bahasa Borobudur, Balai Ekonomi Desa Ngargogondo (Balkondes Ngargogondo), dan Angkringan serta pertanian Desa Ngargogondo. Desa Ngargogondo mulai mendapat ketenarannya melalui salah satu ikon pariwisatanya yang berhasil mengundang ribuan wisatawan dari dalam maupun luar negeri yaitu Desa Bahasa Borobudur (Ferri, 2019).

Desa Bahasa Borobudur merupakan sebuah tempat wisata yang terletak di Dusun Parakan RT/RW 02 Area, Sawah & Kebun, Desa Ngargogondo, Kec. Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (lihat Gambar 1). Desa Bahasa Borobudur didirikan oleh Bapak Hani Sutrisno yang

merupakan pemilik tunggal dari tempat ini. Sebagai tempat wisata, Desa Bahasa Borobudur menawarkan para turis dengan paket liburan sambil belajar Bahasa Inggris. Disamping itu, para turis juga dapat menginap sambil menikmati program belajar yang ditawarkan oleh Desa Bahasa. Keberadaan Desa Bahasa Borobudur ini telah menghasilkan dampak positif dan banyak kesempatan yang baik bagi masyarakat di sekitarnya. Dampak positif yang pertama adalah Desa Bahasa dari sejak berdiri di tahun 1998, telah memberikan kursus Bahasa Inggris gratis bagi warga asli di Dusun Parakan, sampai sekarang. Kedua, banyak dari masyarakat yang mulai bekerja menjadi pegawai di Desa Bahasa Borobudur. Mereka bekerja sebagai staf pengelola tenaga memasak, tenaga tukang, pedagang warung di sekitar Desa Bahasa, pedagang asongan di area parkir, dan tukang jaga parkir. Desa Bahasa juga menyewa lahan di desa sekitar untuk dijadikan prasana penunjang tempat wisata.



Gambar 1. Front Office Desa Bahasa

Sumber: Data Primer, 2021

Peranan Masyarakat Ngargogondo dalam Pembangunan Pariwisata Setempat

Masyarakat Ngargogondo memainkan peranan yang berbeda-beda dalam pembangunan pariwisata di daerah mereka. Melihat perkembangan wisata yang sangat pesat di Candi Borobudur dan sekitarnya, masyarakat Ngargogondo terdorong untuk mengembangkan pariwisata di desa mereka. Salah satunya adalah Bapak Hani Sutrisno, seorang penduduk Desa Ngargogondo yang menjadi pencetus dan pengelola program Desa Bahasa Borobudur. Beliau merupakan pelopor pariwisata di Desa Ngargogondo. Pendirian Desa Bahasa awalnya terinspirasi dari motivasinya memajukan kemampuan Bahasa Inggris masyarakat desanya di tahun 1998, sehingga Bapak Hani mulai membangun desanya dengan memberi kursus gratis Bahasa Inggris bagi warga sekitar Ngargogondo bagi semua kalangan. Meskipun kursus ini tidak berbayar, peserta tetap harus mengeluarkan biaya untuk pembelian buku. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hani:

Walaupun tujuan kita itu diawal mula itu memang ingin warga desa Ngargogondo tujuh kampung itu kursus gratis dan sampai saat ini masih, cuman mereka harus berbiaya untuk pembelian buku. Buku kan kita cetak nggak mungkin kita gratis. Entah kaya atau miskin sama gratis. Tapi kalau buku tetep bayar 150 ribu dapat 3 buku. Sama kalau masuk ke wisata kelinci kalau mereka warga ber KTP Ngargogondo juga gratis.

Program kursus Bahasa Inggris gratis ini mendorong dengan kuat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Pariwisata. Tidak hanya itu, Bapak Hani yang merupakan penduduk asli juga sudah kerap kali membantu pembangunan pariwisata di Desa Ngargogondo dengan memberikan bantuan berupa materi seperti membangun joglo untuk masyarakat desa dan membantu masyarakat dengan menyewa rumah warga untuk *homestay*. Selain itu Bapak Hani juga memperbolehkan masyarakat menggunakan fasilitas di Desa Bahasa untuk mengadakan pelatihan pariwisata bagi masyarakat. Kondisi tersebut dijelaskan Bapak Umar, Ketua Pokdarwis sebagai berikut:

Kalau akses jalan yang ke titik rencana angkringan itu udah bagus di pinggir jalan, cuman penataan apa ya dari segi bangunan lah, bangunan awal, kami juga baru dapat kemarin beli tu joglo satu, itu pun juga dari bantuan Mas Hani juga itu dijadikan Joglo.

Dari hal-hal tersebut, masyarakat Desa Ngargogondo dapat merasakan manfaat dari pembangunan pariwisata yang diwakili oleh keberadaan Desa Bahasa di wilayah Desa Ngargogondo. Sumbangan dan bantuan yang diberikan.

Masyarakat Ngargogondo juga berperan dalam pembangunan pariwisata setempat melalui organisasi-organisasi setempat baik Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemerintahan desa maupun Balkondes (Balai Ekonomi Desa). Semua kegiatan dan upaya memajukan pembangunan pariwisata dilakukan secara swadaya. Mereka tidak keberatan menjalankan pekerjaan utama mereka sebagai petani sekaligus menjalankan perannya dalam pembangunan pariwisata. Sebagai pengelola lokal destinasi Desa Ngargogondo, Pokdarwis memiliki kepentingan untuk mempertahankan keberlangsungan pariwisata di Desa Ngargogondo. Pokdarwis Desa Ngargogondo memiliki fungsi untuk membuat ide-ide pengembangan pariwisata sekaligus mengajak masyarakat dari semua lini untuk terlibat. Misalnya, Pokdarwis mencetuskan ide membuat angkringan, mengatur jadwal pertemuan warga sebulan sekali, dan juga membuat proposal untuk pengajuan dana bantuan ke pemerintah maupun Lembaga.

Selain Pokdarwis, pejabat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa turut berperan dalam memberi motivasi dan arahan kepada Pokdarwis untuk melakukan program-program pariwisata. Pemerintah setempat juga menjadi saluran yang membuka konektivitas dengan pemangku kepentingan terkait diluar pihak desa. Contohnya pemerintah desa menjalin kolaborasi dengan Universitas Tidar, Magelang untuk mengadakan pelatihan pariwisata di Desa Ngargogondo. Pelatihan-pelatihan ini tentu membantu sumber daya manusia di Desa Ngargogondo untuk semakin siap dan terampil dalam mengelola atau mengembangkan pariwisata di desa mereka.

Balkondes sendiri memiliki fungsi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih sadar wisata. Balkondes yang bekerjasama dengan BUMN Pegadaian ini juga mendorong munculnya UKM Desa yang kemudian produknya akan dipajang sebagai etalase di Gedung Balkondes Ngargogondo. Salah satu contoh produk yang dihasilkan oleh Desa Ngargogondo adalah Produk jajanan Jet Kolet yang diperkenalkan pada Bulan Desember 2020. Tampilan fisik Balkondes dan produk Jet Kolet dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Balkondes dan Produk Jet Kolet

(Sumber: Data Primer, 2021)

Acara ini terlaksana atas kerjasama Pokdarwis, Balkondes, dan Desa Bahasa Borobudur. Kemunculan UKM di Desa Ngargogondo sangat krusial mengingat UMKM Jet Kolet sendiri merupakan aktor penghasil modal utama dalam program pemberdayaan masyarakat (Subagyo & Andayani, 2019). Bapak Aryan, pengurus Balkondes, lebih jauh menjelaskan:

Cuman Desa Bahasa, dari pihak Balkondes, Desa Bahasa dan Pokdarwis itu ya berkomitmen untuk memajukan Desa Ngargogondo nya sendiri. Salah satunya di akhir tahun kemarin, kami mengemas prodak, itu prodak jajanan oleh-oleh satu prodak itu Mr. Jet Kolet itu dikemas dari sekitaran Borobudur itu dikemas dan dikasi label Balkondes, Desa Bahasa dan Pokdarwis. hasil penjualan itu ya nanti nya kan dimasukkan ke dalam pokdarwis. Cuman tugas kami Balkondes dan desa bahasa kan untuk setidaknya nanti Pokdarwis ada kegiatan dan ada prodaknya sendiri begitu.

Namun sayangnya produksi ini terpaksa harus berhenti karena adanya pandemi Covid 19.

Di dalam Desa Ngargogondo, juga terdapat masyarakat umum desa yaitu masyarakat yang tidak memegang jabatan apapun di desa. Masyarakat ini adalah mereka yang siap membantu apabila diminta. Masyarakat kelompok ini umumnya bergerak sesuai arahan dan belum memiliki inisiatif dalam pembangunan pariwisata. Keterlibatan mereka umumnya didorong oleh motivasi n upah yang akan mereka dapat. Dalam bahasa Bapak Azis, sekretaris desa, gambaran keterlibatan masyarakat desa sebagai berikut:

Kalau tenaga pembangunan sekarang kita ambil dari masyarakat. Dari dana desa kan ada pekerjaan untuk itu. Nah itu nanti kita tawarin dari masyarakat, siapa yang mau bekerja disana, dengan gaji harian segini. Kalau ada yang mau. Kalau kerja bakti ma, belum anu mbak. Ndak ada yang mau lah.

Kebanyakan masyarakat ini memiliki pekerjaan diluar pariwisata seperti petani. Menurut hasil wawancara, masyarakat umum desa lebih cenderung untuk mengutamakan pekerjaan mereka sebagai petani untuk menyambung hidup. Namun demikian, mereka tetap siap membantu apabila ada kegiatan pariwisata di desa. Contohnya ketika mereka diminta untuk untuk pembangunan, membuat kerajinan, dan menjadi home stays bagi Desa Bahasa Borobudur, dengan catatan adanya bayaran per kamar. Untuk pembangunan, ada gaji perhari yang diberikan kepada mereka.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Ngargogondo terhadap Pembangunan Pariwisata.

Partisipasi masyarakat Desa Ngargogondo dalam pembangunan pariwisata terjadi dalam level yang berbeda-beda. Secara umum terdapat tiga kelompok masyarakat Desa

ngargogondo yang memainkan peranan berbeda-beda yang terdiri dari (1) initiator pariwisata, (2) penggerak pariwisata desa, dan (3) masyarakat umum. Ketiga kelompok masyarakat ini memiliki peran yang berbeda-beda.

Pertama, inisiator pariwisata merupakan kategori yang didalamnya terdapat Bapak Hani Sutrisno selaku pemilik Desa Bahasa dan para pengelolanya. Desa Bahasa Borobudur, melalui Bapak Hani dan pengelola Desa Bahasa, sudah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelatihan, maupun pemeliharaan untuk kemajuan pariwisata, terutama di Desa Bahasa Borobudur. Dengan peran ini sebenarnya partisipasi yang dilakukan Bapak Hani telah masuk dalam kategori Kontrol Masyarakat dimana masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai implementasinya (Arnstein, 1969). Namun, partisipasi masyarakat dalam kategori Kontrol Masyarakat di sebuah destinasi umumnya dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain untuk secara mandiri mengelola destinasi tersebut (Laire & Gutierrez, 2019; Singgalen et al., 2019).

Dalam kasus Desa Ngargogondo, partisipasi aktif yang dilakukan Bapak Hani masih terbatas dalam lingkup Desa Bahasa saja dan belum menjangkau seluruh Desa Ngargogondo. Akibatnya pengaruh partisipasinya masih lebih banyak dirasakan dalam lingkup Desa Bahasa. Pengaruh peran yang dimainkan oleh Bapak Hani dapat dilihat dari kasus-kasus seperti, semakin terkenalnya tempat pariwisata ini yang menghasilkan kesuksesan dalam mendatangkan banyak pengunjung. Selain itu, pegawai Desa Bahasa juga merupakan pihak yang merasakan peningkatan kesejahteraan. Secara umum partisipasi Bapak Hani dan Desa Bahasa dalam membangun Desa Ngargogondo masih seputar pemberian kursus Bahasa Inggris gratis bagi 7 dusun, membangunkan rumah Joglo bagi warga, membuka lapangan pekerjaan, dan menggunakan rumah warga sebagai homestays bagi tamu yang datang. Bapak Hani dan jajarannya belum dapat mendorong partisipasi masyarakat Desa Ngargogondo ke level yang sama dengan dirinya dan jajarannya. Oleh karena itu, dalam hal ini masyarakat Desa Ngargogondo secara umum belum mendapatkan penguatan peran yang dapat memberikan kesempatan untuk dapat mengontrol pengambilan keputusan mengenai pembangunan pariwisata setempat (Dolezal & Novelli, 2020).

Kedua, penggerak pariwisata merupakan kategori yang didalamnya terdapat perangkat desa, pejabat pemerintah desa, dan kelompok sadar wisata atau lebih dikenal dengan sebutan Pokdarwis serta Balkondes. Penggerak Pariwisata ini memiliki partisipasi masyarakat dalam level partisipasi ketiga dan keempat yakni Informasi dan Konsultasi dan berada pada level Derajat Tokenisme. Kelompok masyarakat ini merupakan penggerak utama di Desa Ngargogondo yang sudah mengetahui fungsi, hak, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pariwisata di Desa Ngargogondo. Kelompok ini sudah memiliki motivasi untuk berani mengemukakan pendapat dalam pembangunan pariwisata di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan tercetusnya wacana dari warga untuk memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat pariwisata baru, yaitu Angkringan Ngargogondo (lihat Gambar 3), guna menambah ikon pariwisata yang telah ada yakni Desa Bahasa Borobudur dan Balai Ekonomi Desa (Balkondes).



Gambar 3. Angkringan Ngargogondo

Sumber: Data Primer, 2021

Masyarakat lokal direncanakan untuk memanfaatkan lahan yang berada di Ngargosari dengan membuat angkringan makanan desa, area berkemah, dan lahan pertanian. Nantinya angkringan makanan desa ini akan menjual kerajinan makanan khas desa seperti es londok serta aneka cinderamata. Area berkemah nantinya diharapkan juga akan menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Desa Ngargogondo. Lahan pertanian yang ditanami buah Kelengkeng juga sedang disiapkan untuk menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Semua ide kreatif ini berasal dari masyarakat dan para penggerak ini menggerakkan warga mereka untuk tidak sekedar menjadi penonton saja, mulai dari pemudanya dan warganya. Namun, penggerak pariwisata di Desa Ngargogondo masih terbatas pada empat permasalahan, yakni pergerakan pariwisata ini baru saja dimulai di tahun 2020, kurangnya anggaran desa dalam bergerak, kurangnya pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat dari pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya, serta kegiatan kesibukan masyarakat dalam ber-gotong royong yang bertabrakan dengan jadwal kegiatan pariwisata. Dalam komunitas dengan level Informasi dan Konsultasi, kegiatan kepariwisataan memang sering berbenturan dengan kegiatan sosial masyarakat. Seperti temuan (Barreto et al., 2016; Mak, 2015), di Desa Ngargogondo sering terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan pariwisata dengan kepentingan dan kebutuhan riil warga.

Ketiga, masyarakat umum desa dari masyarakat lokal. Kategori ini adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pembangunan pariwisata di Desa Ngargogondo. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang tidak menjabat dalam pemerintah desa. Mereka cenderung pasif dan hanya mengikuti arahan atau ajakan dari pemerintah desa atau pengelola desa bahasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat ini masih membutuhkan intervensi dari pihak luar untuk membantu mereka dalam membangun pariwisata daerahnya. Tidak tampak kemunculan ide-ide dari kelompok masyarakat ini. Dalam partisipasinya di Desa Bahasa, mereka umumnya berperan sebagai sumber daya manusia, seperti menjadi tukang bangunan, penjaga warung, koki, dan tukang parkir. Posisi-posisi ini yang umumnya diisi oleh masyarakat di kelompok ini karena sumber daya manusia yang masih rendah. Masyarakat pada kategori ini termasuk dalam anak tangga partisipasi Manipulasi dan masuk dalam kelompok terendah, yakni Nir-partisipasi Masyarakat lokal ini mengikuti nilai dan sikap dari masyarakat yang lebih besar, yakni pemerintah desa, yang cenderung aktif dalam pariwisata.

Keterlibatan mereka dalam pariwisata hanya sebatas jika diminta terlibat oleh inisiator dan penggerak pariwisata. Mereka umumnya hanya menerima informasi dan tidak terlibat dalam membuat kebijakan yang mana kebijakannya telah dibuat oleh para inisiator dan penggerak pariwisata. Padahal, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan rekognisi penting bagi masyarakat yang akan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan (Tolkach & King, 2015). Terbatasnya keterlibatan kelompok masyarakat ini juga disebabkan oleh mata pencaharian utama masyarakat Desa Ngargogondo yang mayoritas masih mengandalkan pertanian. Oleh karena itu masyarakat Ngargogondo lebih memilih menjalankan mata pencahariannya sebagai petani dan tidak terlalu terlibat dalam partisipasi pariwisata. Situasi diatas diperkuat dengan penemuan dari Salsabila & Fauzi (2021) yang mencatat bahwa apabila mata pecaharian masyarakat mayoritas adalah petani, dari pagi sampai sore akan kehabisan waktu untuk kegiatan lain karena digunakan untuk mengelola sawah. Namun, level Manipulasi yang terjadi di Desa Ngargogondo tidak seperti keadaan pada umumnya, dimana suatu daerah di kontrol sepenuhnya oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah ataupun birokrasi yang ada, dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi (Hamedi, 2016; Telfer & Sharpley, 2007). Di Desa Ngargogondo, masyarakat sudah berusaha dilibatkan dalam pembangunan pariwisata, namun masyarakat memilih untuk tetap menjalankan mata pencahariannya sebagai petani, sehingga level partisipasi bagi masyarakat umum ini hanya berhenti di level terendah dalam tangga Partisipasi Arnstein.

Penemuan diatas membuktikan bahwa masyarakat dalam suatu komunitas terdiri dari pemangku kepentingan yang bervariasi sehingga partisipasi masyarakat bersifat beragam (Lasso & Dahles, 2021; Li & Hunter, 2015). Oleh karena itu, bentuk partisipasi dalam sebuah komunitas pun berpotensi terjadi secara beragam. Masyarakat Desa Ngargogondo dapat menjadi contoh bahwa dalam suatu daerah, partisipasi yang ada tidak bisa dipukul rata karena terdapat berbagai kelompok masyarakat yang pasti akan menghasilkan bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda pula. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat perlu dilakukan dengan cara yang tepat, menyesuaikan dengan keberagaman potensi peran yang mungkin dilakukan dalam sebuah masyarakat.

Kesimpulan

Pariwisata Berbasis Masyarakat yang melibatkan masyarakat di desa Ngargogondo telah menghasilkan bentuk partisipasi masyarakat yang beragam. Kasus di Ngargogondo menunjukkan bahwa kepentingan dan posisi sosial masyarakat yang berbeda-beda menghasilkan peran yang berbeda-beda dalam pembangunan pariwisata setempat. Hal tersebut menghasilkan partisipasi dalam berbagai level, yaitu: Kontrol masyarakat, Konsultasi dan Manipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu komunitas tidaklah homogen, terdapat heterogenitas yang terbentuk di sebuah masyarakat yang berakibat pada perbedaan peran yang dimainkan masyarakat dalam sebuah pembangunan pariwisata.

Dalam kajian-kajian mengenai partisipasi masyarakat pada sebuah komunitas, tidak dapat digeneralisasi ke dalam suatu tahapan partisipasi saja. Komunitas masyarakat harus dipandang sebagai kelompok masyarakat yang heterogen sehingga sangat mungkin ditemukan bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda-beda di dalamnya. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat harus dilakukan dengan sudut

pandang bahwa masyarakat adalah heterogen dan pendekatan partisipasi harus dilakukan secara berbeda-beda. Studi kasus di Desa Ngargogondo ini dapat dijadikan sebuah contoh bagi pembangunan pariwisata Indonesia akan adanya masyarakat yang heterogen dengan bentuk partisipasi yang beragam.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2019). *Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2019*.
- Barreto, R., Mendes, F., & Regina, K. (2016). Application of the “Ladder of Citizen Participation” to the Analysis of the São Paulo Master Plan Revision Process. *SBE16 Brazil & Portugal Sustainable Urban Communities towards a Nearly Zero Impact Built Environment, September*, 1859–1868.
- Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, 40(1), 39–49. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi005>
- Brett, E. A. (2010). Participation and accountability in development management Participation and Accountability in. *Development*, 40(September 2011), 37–41. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan042453.pdf>
- Cater, E. (2006). Ecotourism as a Western construct. *Journal of Ecotourism*, 5(1–2), 23–39. <https://doi.org/10.1080/14724040608668445>
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2020). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527>
- Ferri, R. (2019). *Kisah Desa Bahasa Borobudur Magelang Sukses Didatangi Ribuan Warga Lokal dan Mancanegara*. Jogja Tribun News. <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/01/kisah-desa-bahasa-borobudur-magelang-sukses-didatangi-ribuan-warga-lokal-dan-mancanegara>.
- Geogra, F., & Gadjah, A. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Hamedi, M. (2016). *Tourism Development, Community Participation and Community Empowerment: The Case of Shiraz in Iran*. <https://core.ac.uk/download/pdf/76979871.pdf>
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Magelang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.22146/jpt.43802>
- Laire, E., & Gutierrez, M. (2019). Participation in tourism: Cases on Community-Based Tourism (CBT) in the Philippines. *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies*, 37(2018), 23–36. http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/2_RJAPS37_Gutierrez.pdf
- Lasso, A. H., & Dahles, H. (2021). A community perspective on local ecotourism development: lessons from Komodo National Park. *Tourism Geographies*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1953123>
- Li, Y., & Hunter, C. (2015). Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 5(3), 248–262. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027>
- Mak, B. K. L. (2015). *Community participation in tourism : a case study from Tai O , Hong Kong*

Title Community participation in tourism : a case study from Tai O , Hong Kong Tao , TCH ; Peart , MR Mak , Kwun-ling .; ž ¥ Q s² . Citation Issued Date Rights The author retains all. January 2011. <https://doi.org/10.5353/th>

- Meilania. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Wisata Batik Di Desa Wukirsari , Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti*, 24(2), 89–98.
- Ndlovu, J., Nyakunu, E., & Auala, S. (2011). Community based tourism in Twyfelfontein conservancy : exploring local community's involvement. *International Journal of Hospitality & Tourism Systems*, 4(2), 38–46.
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529. <https://doi.org/10.2167/jost782.0>
- Salsabila, M. S., & Fauzi, A. M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 38–49. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i1.1408>
- Sangkakorn, K., & Suwannarat, S. (2013). Local People Participation in Tourism Development: The Case Study of Chiang Mai. *The 2nd Conference on Asian Economic Development, August 2013*, 1–10.
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019). Community participation in regional tourism development: a case study in North Halmahera Regency - Indonesia. *Insights into Regional Development*, 1(4), 318–333. [https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.4\(3\)](https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.4(3))
- Subagyo, W. H., & Andayani, A. (2019). Model Pengembangan Kawasan Wisata Pedesaan Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Desa Tegalwaru, Ciampea, Bogor). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 24(1), 11–21.
- Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2007). Tourism and development in the developing world. In *Tourism and Development in the Developing World*. <https://doi.org/10.4324/9780203938041>
- Timothy, D. J. (1999). Participatory planning a view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371–391. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00104-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00104-2)
- Tolkach, D., & King, B. (2015). Strengthening Community-Based Tourism in a new resource-based island nation: Why and how? *Tourism Management*, 48, 386–398. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.12.013>
- Tosun, C. (2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: The case of Turkey. *Tourism Management*, 22(3), 289–303. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00060-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00060-1)
- UNWTO. (2014). *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*. <https://www.unwto.org/sustainable-development>